

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan bagian dari desentralisasi, diharapkan dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan Negara. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Menurut beberapa pakar bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus penting guna memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah disesuaikan oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan potensi yang ada serta ciri khas dari daerahnya masing-masing. Semakin luasnya pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendelegasian kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya

manusia (SDM). Akuntabilitas oleh pemerintah daerah sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai (*agents*) bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Teori keagenan beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak *agent* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh *agent* (pemerintah). Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Menurut Mahmudi (2016:18). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Berdasarkan berita dari *INewsSumsel.id* selama kurun waktu 5 tahun terakhir tercatat telah terjadi 3 kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp6,5 miliar, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus berusaha lebih keras untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Tabel 1.1
Perkembangan LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu

No	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu	Tahun
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2016
2	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2017
3	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2018
4	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2019
5	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2020

Sumber: IHPS 1 BPK RI Periode 2016-2020

Dari tabel 1.1. Perkembangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat terlihat selama periode 2016-2020 selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

terlihat baik dari tahun ketahun, tetapi kasus korupsi masih terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penentuan opini sangat tergantung pada nilai temuan audit, opini (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian adalah salah satu indikator pengelolaan keuangan yang akuntabel. Pemerintah daerah harus secara serius mempertimbangkan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap tingkat korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap tingkat korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan informasi tentang pengaruh akuntabilitas terhadap tingkat korupsi serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian sebelumnya.

b. Manfaat Praktis

1. Memberi sumbangan referensi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan mengenai akuntabilitas laporan keuangan.
2. Memberi sumbangan referensi bagi organisasi sektor publik yang berwenang dalam menentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kaitanya dengan akuntabilitas dalam usahanya mengurangi praktek korupsi yang banyak terjadi di organisasi sektor publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu.